

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2018 merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada triwulan II tahun anggaran 2018 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Triwulan merupakan rangkaian Laporan Tahunan yang dibuat secara periodik yang bermanfaat memberikan gambaran pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Ditjen Bimas Islam

Laporan ini memuat hasil pencapaian kontrak kinerja pada tahun anggaran berjalan yang terbagi kedalam 4 (empat) periode yakni Triwulan I, II, III, dan IV yang selanjutnya akan disusun menjadi Laporan Kinerja Tahunan.

Kami berharap, penyajian Laporan Kinerja Triwulan II ini dapat menjadi alat ukur untuk mengevaluasi kinerja organisasi sampai dengan Triwulan IV agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien di triwulan berikutnya sehingga mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Jakarta, Juli 2018

Direktur Jenderal

Muhammadiyah Amin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi

I	IKHTISAR EKSEKUTIF	3
II	PERJANJIAN KINERJA	5
I	AKUNTABILITAS KINERJA	6
A.	CAPAIAN KINERJA	6
B.	REALISASI ANGGARAN	16
C.	HAMBATAN/KENDALA	16
C.1	HAMBATAN UMUM	16
C.2	HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR	17
D.	UPAYA TINDAK LANJUT	18
IV	PENUTUP	20
	KESIMPULAN	20
V	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	MATRIKS CAPAIAN KINERJA SIPKA	

BAB I

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Ditjen Bimas Islam dalam mendukung visi Kementerian Agama periode 2015 - 2019 adalah “Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang taat beragama dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. Sebagai bagian dari Kementerian Agama, Ditjen Bimas Islam mempunyai tugas strategis berdasarkan PMA Nomor 42 tahun 2016 menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada arah kebijakan Kementerian Agama, selama kurun waktu 2015-2019, Bimas Islam melaksanakan 1 (satu) dari 11 program Kementerian Agama yaitu program Bimbingan Masyarakat Islam, dengan sasaran strategis nya sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam;
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam;
- 3) Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat wakaf.

Setiap sasaran strategis tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Terdapat 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan sebagai standar kinerja selama tahun 2018. Pencapaian visi dan misi organisasi juga didukung dengan serangkaian penetapan inisiatif Reformasi Birokrasi.

Secara umum, capaian kinerja Ditjen Bimas Islam menunjukkan pencapaian yang sudah mulai berjalan namun belum secara keseluruhan dikarenakan ada beberapa IKU (Indikator Kinerja Utama) yang hasilnya dapat dilihat pada triwulan III atau triwulan IV seperti Persentase tanah wakaf bersertipikat akan ada hasilnya di triwulan III dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang hasilnya akan ada di triwulan IV. Maka capaian kinerja Ditjen Bimas Islam sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebesar 32,52% dengan target yang direncanakan di triwulan II sebesar 38%. Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan, hanya 2 Indikator yang sudah mencapai 50%, sementara 7 (tujuh) Indikator lainnya capaiannya masih dibawah 50% dari target pertahunnya.

Di Triwulan berikutnya dalam mencapai target kinerja yang belum tercapai di triwulan II akan terus berupaya melakukan koordinasi lebih intensif dengan instansi terkait, lembaga/masjid penerima bantuan dan

Kanwil Kementerian Agama Provinsi dalam upaya pemenuhan data yang telah terealisasi.

Untuk mendukung Capaian Kinerja tahun 2018 ini, Ditjen Bimas Islam memiliki anggaran sebesar : Rp.5.130.689.599.000,- sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) menyisakan 3 gedung di tahun 2017 yang belum direalisasikan maka anggaran dilanjutkan ke tahun anggaran 2018, sehingga anggaran mengalami perubahan menjadi Rp.5.132.509.063.000,- dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp.2.043.891.066.320 atau 39,82%.

Ditjen Bimas Islam akan melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan agar dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintah yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB II PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Islam Tahun 2018 ditandatangani di bulan Desember 2017, telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja, dengan masing-masing targetnya sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018. Berikut Indikator Kinerja dan target Ditjen Bimas Islam:

**Tabel 1
Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)		(3)	(5)
1	Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam	1.	Jumlah penyuluh agama Islam yang terfasilitasi	49.423 orang
		2.	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan	145 lembaga
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam	3.	Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	3.078 KUA
		4.	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi	921 masjid/mushola
		5.	Indeks Kepuasan Layanan KUA	70
		6.	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan fasilitas bimbingan perkawinan	149.646 catin
3	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan	7.	Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat	70%
		8.	Jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "terbaik" audit syariah	3 BAZNAS
		9.	Jumlah Pilot Project kampung zakat	7 lokasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

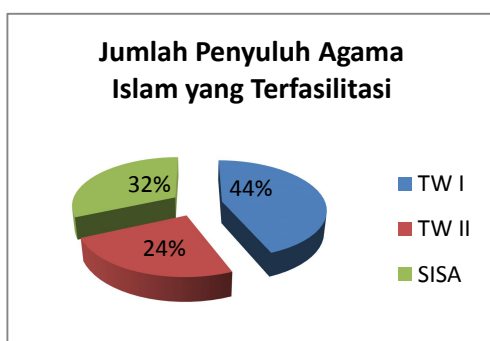
Ditjen Bimas Islam telah menetapkan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing indikator sudah mencakup program dan kegiatan sampai ke Satuan kerja Daerah. Pada triwulan II ini hanya 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang mencapai target 50% yaitu indikator Jumlah penyuluh agama Islam yang terfasilitasi sebesar 68,35% dan indikator jumlah pilot project Kampung Zakat sebesar 57,14%. Secara umum, hingga triwulan II ini rerata capaian kinerja Ditjen Bimas Islam Tahun 2018 telah tercapai sebesar 32,52%/tahun.

RERATA CAPAIAN KINERJA : 32,52%/TAHUN
RERATA CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II : 60,67%/TRIWULAN II

Berikut 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang telah mencapai 50%

Tabel 2
2 (dua) Indikator Kinerja Utama mencapai 50%

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%/THN
1	Jumlah penyuluh agama Islam yang terfasilitasi	49.423 penyuluh	33.779 penyuluh	68,35
2	Jumlah Pilot Project kampung zakat	7 Lokasi	4 Lokasi	57,14



1) Jumlah Penyuluh Agama Islam yang Terfasilitasi

Pada tahun ini Ditjen Bimas Islam menargetkan penyuluh agama Islam yang terfasilitasi sebanyak 49.423 penyuluh PNS dan Non PNS. Dengan komposisi 45.000 penyuluh non PNS yang difasilitasi

dengan bantuan operasional dan 4.497 penyuluh PNS yang difasilitasi dengan pembinaan. Di triwulan II ini telah terealisasi sebanyak 33.779 penyuluh yang telah di fasilitasi dengan bantuan operasional dan pembinaan, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 3
Komposisi Penyuluh Agama Islam yang Terealisasi

NO	PROVINSI	TARGET	CAPAIAN
1	Sumatera Utara	3349	1727
2	Riau	720	321
3	Jambi	754	323
4	Lampung	192	74
5	Kalimantan Utara	312	124
6	Sulawesi Utara	788	573
7	Sulawesi Tengah	5824	3060
8	Maluku	274	184
9	Maluku Utara	161	75
10	NTB	1185	800
11	Bengkulu	460	369
12	Banten	1010	756
13	Jawa Timur	5310	4530
14	Aceh	1536	1236
15	Sumatera Barat	2188	1806
16	Kalimantan Selatan	1057	882
17	Kep. Riau	262	180
18	Jawa Barat	5755	3820
19	NTT	840	527
20	Sulawesi Selatan	2079	1883
21	Sulawesi Barat	362	270
22	Sumatera Selatan	1171	950
23	Lampung	726	630
24	Sulawesi Tenggara	777	567
25	Papua	164	127
26	Papua Barat	288	195
27	Kalimantan Timur	343	247
28	DKI Jakarta	866	554
29	Jawa Tengah	7477	4650
30	Yogyakarta	1036	800
31	Bangka	264	156
32	Kalimantan Barat	824	643
33	Kalimantan Tengah	515	365
34	Bali	554	375
		49423	33779

2) Jumlah Pilot Project Kampung Zakat

Kampung zakat adalah program baru yang di gagas oleh Ditjen Bimas Islam, bentuk kolaborasi antara Ditjen Bimas Islam, Forum Zakat, BAZNAS, dan LAZ. Kampung Zakat merupakan sebuah ekstensifikasi penanggulangan kemiskinan dengan penyaluran zakat, dengan tujuan mengurangi jumlah desa tertinggal terutama menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Tahun ini direncanakan 7 lokasi yang akan di jadikan pilot project kampung zakat didaerah tertinggal yaitu : NTB, Banten Kab. Lebak, Bengkulu Kab. Celuma, Kalbar Kab. Sambas, NTT kab. Belu, Maluku Utara kab. Halmahera, dan Provinsi Papua Barat. Pada triwulan II telah terealisasi sebanyak 4 lokasi, diantaranya : Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Banten dan Ternate.

Indikator Kinerja Utama yang sudah berjalan di triwulan II, namun belum capaiannya masih dibawah 50%, diantaranya adalah :

Tabel 4
7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama yang belum mencapai 50%

NO	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%/THN
1	Jumlah lembaga sosial keagamaan yang difasilitasi dalam memenuhi standar minimal lembaga keagamaan	145 lembaga	4	2,76
2	Jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan *angka berjalan, ditahun 2017 telah tercapai 2.968 KUA atau sebesar 96,43%	3.078 KUA*	2.968 KUA*	96,43*
3	Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi	921 masjid/mushalla	113 Masjid/mushalla	12,27
4	Indeks Kepuasan Layanan KUA	70	0	0
5	Jumlah calon pengantin yang mendapatkan fasilitas bimbingan perkawinan	149.646 catin	33.568 catin	22,43

6	Persentase Tanah Wakaf yang Bersertifikat *Tahun 2017 : 66,01% dari 435.395 lok *Tahun 2018 : 436.302 lok	70%	65,93%	94,19
7	Jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "terbaik" audit syariah	3 Baznas	1 Baznas	33,33

1) Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang Difasilitasi dalam Memenuhi Standar Minimal Lembaga Keagamaan

Ditjen Bimas Islam menargetkan 145 Lembaga Keagamaan yang akan difasilitasi di tahun 2018. Pada triwulan II Ditjen Bimas Islam telah mencairkan bantuan untuk lembaga sosial sebanyak 4 lembaga, yaitu: MUI, NU, Muhammadiyah dan PP Pemuda Muhammadiyah.

2) Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

Target jumlah KUA yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan pada tahun 2018 adalah sebanyak 3.078 KUA, dan pada tahun 2017 Ditjen Bimas Islam telah mencapai targetnya yaitu sebanyak 2.968 KUA. Pada triwulan II ini, Ditjen Bimas Islam sedang menyempurnakan kembali regulasi tentang standar pelayanan KUA sehingga di triwulan II jumlah KUA yang memenuhi standar layanan masih sebanyak 2.968 KUA.

3) Jumlah Masjid/Mushola yang terfasilitasi

Pada tahun 2018 Ditjen Bimas Islam menargetkan 921 masjid/Mushalla yang terfasilitasi dengan rencana komposisi sebagai berikut :

Tabel 5

Rencana Jumlah Masjid/Mushalla yang Terfasilitasi

MASJID	PUSAT	DAERAH	TOTAL
Pembangunan	78	150	228
Rehab	130	304	434

Operasional	11	50	61
TOTAL	219	504	723

MUSHALLA	PUSAT	DAERAH	TOTAL
Pembangunan	10	50	60
Rehab	34	50	84
Operasional	4	50	54
TOTAL	48	150	198

Alokasi bantuan masjid dan mushalla ini diperuntukkan sebagai bantuan pembangunan, rehab, dan operasional Masjid dan Mushalla dengan mengacu pada Juknis penyaluran bantuan yang disesuaikan dengan PMA Nomor 168 Tahun 2014. Proses penyaluran bantuan diawali dengan melakukan seleksi atas proposal-proposal yang diajukan dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring/survey langsung ke masjid yang mengajukan, setelah itu diterbitkan SK penetapan. Hingga triwulan I ini telah terealisasi bantuan untuk masjid/mushalla sebanyak 113 masjid dan mushalla dengan komposisi 99 Masjid dan 14 Mushalla.

4) Indeks Kepuasan Layanan KUA

Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan di KUA dimaksudkan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat kinerja KUA terhadap layanan yang diberikan serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai layanan yang diterima.

Sesuai dengan Permenpan nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa hasil survey IKM adalah untuk :

- a) Mengetahui kelemahan atau kekuatan unit penyelenggara pelayanan
- b) Mengetahui kinerja penyelenggara secara periodik

- c) Sebagai bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan
- d) Partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- e) Memacu persaingan positif antar unit penyelenggara pelayanan

Ditjen Bimas Islam akan melaksanakan survey IKM dengan tujuan untuk memetakan kinerja pelayanan publik menurut persepsi pengguna jasa layanan. Dengan memperhatikan :

- a) Internal area, yang diantaranya SDM KUA, Fasilitas, ketersediaan anggaran;
- b) Proses area, mencakup pelaksanaan layanan pencatatan nikah, proses control terkait dengan SOP dan kualitas proses pencatatan; dan
- c) external area, terkait kebutuhan layanan masyarakat dan kepuasan masyarakat atas layanan di KUA.

Adapun tahapan yang akan dilalui untuk menghasilkan Indeks kepuasan masyarakat yaitu melalui tahapan sbb :



- a) Tahap Konstruksi (triwulan I)
Ditjen Bimas Islam telah melakukan konstruksi pelaksanaan IKM tahun 2018, yaitu dengan mengevaluasi kembali instrumen IKM, mengeksplorasi faktor-faktor pendukung penilaian kepuasan layanan masyarakat untuk dijadikan indikator penilaian. Ini dilakukan pada tw I.
- b) Tahap Instrumentasi (triwulan II)
Ditjen Bimas Islam saat ini sedang melakukan tahap instrumentasi, yaitu melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen yang telah disusun pada tw I.
- c) Tahap Survei (triwulan III)

Survey IKM akan dilakukan di tw III dengan metode sampling, minimal 1 KUA mendapatkan sample sebanyak 20 kuesioner.

d) Tahap Analisis dan penyusunan Laporan (triwulan IV)

Setelah semua hasil survey telah terkumpul, maka akan dianalisis bagaimana efektivitas layanan (IKM) yang sudah berjalan di KUA dengan ukuran efisiensi proses dan efektifitas perangkat yang ada di KUA. Hasil ini akan dilaporkan di tw IV.

Gambar 1
Tampilan Instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah di evaluasi

Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat

Bapak/Ibu/Sdr. Yang Terhormat,
Kami mohon perkenan anda mengisi kuesioner berikut ini sebagai upaya kami terus-menerus memperbaiki dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Partisipasi Anda akan sangat berguna untuk menyusun indeks kepuasan masyarakat atas layanan KUA.
Form kuesioner ini juga dapat diakses melalui:
www.bimasistem.kemennag.go.id
Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

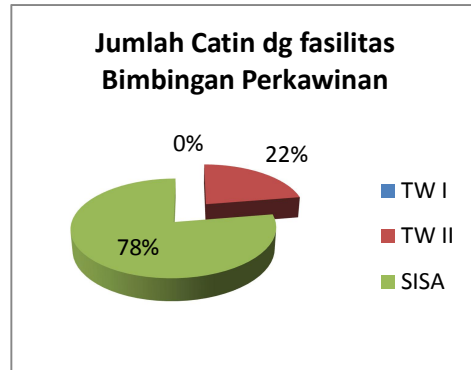
Variabel	Pertanyaan	SB	B	C	K	
A. Produk (Quality)	Produk spesifikasi					
	- Petugas Pencatat Nikah Datang ke Lokasi akad tepat waktu					
	- Proses pemanduan Akad Nikah dilakukan dengan baik (oleh Petugas)					
	- Buku Nikah diterbitkan sesuai waktu yang ditentukan					
	- Informasi yang tertera di Buku Nikah sesuai (Tidak terdapat kesalahan penulisan)					
	B. Proses (total manajemen)	1. Biaya tarif				
		- Biaya pencatatan nikah sesuai ketentuan peraturan pemerintah				
		- Informasi biaya Pencatatan Nikah mudah diakses (terjangkau) dan mudah dipahami				
		- Petugas memberikan penjelasan secara terbuka tentang biaya layanan yang harus dipenuhi				
		- Baki pembayaran diterima oleh calon pengantin				
		2. Waktu layanan				
		- Informasi terkait waktu layanan jelas dan mudah diakses				
		- Pelayanan dilakukan sesuai waktu yang ditentukan (Standar Pendaftaran)				
		3. Sarana dan Prasarana				
		Menurut yang anda amati, sarana-prasarana yang dimiliki KUA :				
- Ketersediaan balai nikah						
- Ruang tunggu						
- Komputer dan jaringan internet						
- Ruang (Meja) Pendaftaran/ Front Office						
- Area Parkir						
- Alat Pemadam Kebakaran						
- Ruang Menyusui						
- Toilet						
4. Persewaan						
- Informasi persyaratan pencatatan nikah mudah diakses/dicari/didapatkan						
- Informasi persyaratan pelayanan mudah dipahami/jelas						
- Persyaratan pencatatan nikah mudah dipenuhi						
- Persyaratan pencatatan nikah sesuai ketentuan						
5. Sistem, mekanisme dan Prosedur						
- Proses Pendaftaran sederhana (Tidak berbelit-belit)						
- Pemeriksaan Kelengkapan dan kesesuaian berkas pendaftaran dilakukan secara cermat						
- Pengumuman Kehendak Nikah dilakukan secara terbuka (dipajang di tempat umum)						
Proses Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dilakukan sesuai ketentuan						
- Materi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dirasakan sesuai dengan kebutuhan calon pengantin						
C. Performa	1. Kompetensi					
	Menurut yang anda amati, bagaimana kemampuan petugas KUA:					
	- Petugas terlihat menguasai bidang pelayanannya					
	- Petugas terlihat cakap dalam melakukan pekerjaannya					
	- Petugas terlihat percaya diri dalam melayani masyarakat					
	- Tampilan petugas meyakinkan (bersih dan rapi)					
	2. Perilaku					
	Menurut apa yang anda amati, bagaimana perilaku petugas KUA:					
	- Petugas ramah (senyum/sapa/sopan) dalam memberikan pelayanan					
	- Petugas peka dengan kebutuhan masyarakat					
	- Petugas responsif menanggapi keluhan masyarakat					
	- Petugas bersikap adil (tidak diskriminatif) dalam memberikan pelayanan					
	3. Penanganan aduan					
	Menurut yang anda amati, apa saja media pengaduan yang dimiliki KUA dan cukup memadai:					
	- Petugas penerima aduan (Customer Service)					
- Baki aduan/saran						
- Informasi terkait aduan melalui hotline (sms/telepon/whats App)						

Keterangan:
SB: Sangat Baik B: Baik C: Cukup K: Kurang

5) Jumlah Calon Pengantin yang Mendapatkan Fasilitas Bimbingan Perkawinan

Dalam rangka menekan angka perceraian, Ditjen Bimas Islam bekerja sama dengan Puslitbang menerbitkan buku bacaan mandiri bagi calon pengantin dan modul bimbingan perkawinan calon pengantin untuk fasilitator yang memandu bimbingan perkawinan di setiap daerah.

Didasari dengan terbitnya SK Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 menggantikan SK Dirjen Bimas Islam Nomor 881 Tahun 2017 ini melaksanakan penguatan persiapan perkawinan tidak hanya di orientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga



mempersiapkan pasangan nikah dalam mengelola konflik rumah tangga dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat.

Upaya ini menjadi langkah strategis Ditjen Bimas Islam dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun di atas pondasi yang kuat dan kokoh. Pengetahuan, kesadaran, perspektif, dan komitmen dari para pihak, teristimewa kedua belah pasangan nikah bisa menjadi niscaya.

Setelah mempersiapkan tim bimbingan calon pengantin yang nantinya akan membimbing para calon pengantin di triwulan I, selanjutnya para fasilitator bimbingan perkawinan di setiap provinsi melakukan bimbingan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Jumlah calon pengantin yang sudah terfasilitasi bimbingan perkawinan untuk triwulan II adalah sebanyak 33.568 catin dari targetnya sebanyak , dengan rinciannya sebagai berikut :

Tabel 5
Rincian Jumlah Calon Pengantin yang Terfasilitasi Bimbingan Perkawinan

Provinsi	Jumlah Catin Terbimbing (22%)
01 DKI JAKARTA	12.328
02 JAWA BARAT	4.452
03 JAWA TENGAH	2.514
04 DI YOGYAKARTA	548
05 JAWA TIMUR	2.579
06 ACEH	1.449
07 SUMATERA UTARA	34
08 SUMATERA BARAT	793
09 RIAU	79
10 JAMBI	657
11 SUMATERA SELATAN	714

12 LAMPUNG	616
13 KALIMANTAN BARAT	101
14 KALIMANTAN TENGAH	131
15 KALIMANTAN SELATAN	219
16 KALIMANTAN TIMUR	140
17 SULAWESI UTARA	32
18 SULAWESI TENGAH	1.779
19 SULAWESI SELATAN	440
20 SULAWESI TENGGARA	541
21 MALUKU	354
22 BALI	258
23 NUSA TENGGARA BARAT	159
24 NUSA TENGGARA TIMUR	7
25 PAPUA	0
26 BENGKULU	399
27 MALUKU UTARA	381
28 BANTEN	538
29 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	500
30 GORONTALO	0
31 KEPULAUAN RIAU	470
32 PAPUA BARAT	116
33 SULAWESI BARAT	146
34 KALIMANTAN UTARA	96
	33.568

6) Persentase Tanah Wakaf yang Bersertipikat

Total jumlah tanah wakaf adalah sebanyak 436.302 lokasi, dan yang sudah bersertipikat di tahun 2017 sebanyak 287.653 lokasi (65,93%). Pada tahun 2018 tanah wakaf yang di fasilitasi dengan bantuan pengurusan sertipikat di targetkan sebanyak 2.501 lokasi tanah wakaf melalui forum Nazhir untuk membiayai proses pendaftaran sertipikat tanah. Adapun bantuan biaya operasional proses pendaftaran sertipikat wakaf untuk tanah wakaf yang belum terdaftar menurut SK Dirjen Bimas Islam Nomor 262 Tahun 2018 tentang Penetapan Petunjuk Tekhnis Bantuan Pengurusan Sertipikasi Tanah Wakaf Tahun 2018, yaitu :

1. Biaya pelayanan pemeriksaan tanah;
2. Biaya pelayanan survei, pengukuran dan pemetaan.

Setelah Petunjuk Tekhnis bantuan pengurusan sertipikat wakaf selesai dibuat, maka di triwulan II ini Ditjen Bimas Islam sudah memulai

proses sertipikat tanah wakaf di tingkat provinsi dan akan dilaporkan hasilnya di triwulan III.

- 7) Jumlah lembaga zakat (Badan Amil Zakat Provinsi) dengan opini "terbaik" audit syariah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat, pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Islam memiliki perhatian khusus terhadap lembaga pengelola zakat, baik LAZ, BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki prestasi dalam mengelola zakat sesuai tujuan pengelolaan zakat yang termaktub dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 yaitu meningkatkan efektivitas, efisiensi pelayanan dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Untuk indikator jumlah lembaga zakat dengan opini "terbaik" audit syariah pada triwulan II ini telah menentukan Baznas Prov. Jawa Barat dengan nilai 96,22 sesuai dengan juknis pengawasan, pendampingan audit syariah, dan akreditasi lembaga pengelola zakat tahun 2018. Dalam Juknisnya Penilaian berdasarkan pengujian substansi audit kepatuhan syariah terhadap pengumpulan dana zakat, audit kepatuhan syariah pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta audit kepatuhan syariah penggunaan hak amil.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mendukung pelaksanaan Program Bimbingan Masyarakat Islam, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.5.132.509.063.000,-, dan telah terealisasi di triwulan II sebesar Rp.2.043.891.066.320,- atau 39,82%. Dengan komposisi realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 4
Realisasi Anggaran per Triwulan II

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	Rp. 982.399.356.000	Rp. 199.389.210.724	20,30
2	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	Rp. 45.507.374.000	Rp. 13.076.808.431	28,74
3	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	Rp. 350.295.253.000	Rp. 123.913.042.677	35,37
4	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	Rp. 96.568.271.000	Rp. 26.396.715.127	27,33
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	Rp. 3.657.738.809.000	Rp.1.681.126.189.261	45,96
		Rp. 5.132.509.063.000	Rp.2.043.891.066.320	39,82

C. HAMBATAN/KENDALA

1) HAMBATAN UMUM

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja 2018 ini, Ditjen Bimas Islam masih dihadapi hambatan dan kendala yang memerlukan pemecahan masalah demi terciptanya keberhasilan pencapaian tujuan. Selain perubahan struktur menjadi penghambat, hambatan lainnya juga bisa muncul dari faktor internal maupun eksternal, diantaranya :

a. Faktor Internal

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Ditjen Bimas Islam diantaranya memiliki kewajiban untuk memfasilitasi Lembaga, masjid serta fasilitasi bantuan untuk sertifikasi tanah wakaf, namun seringkali perubahan kebijakan pengalokasian anggaran yang direvisi ditingkat daerah berpengaruh besar pada ketepatan hasil capaian kinerja IKU tersebut. Selain itu, masih belum

optimalnya proses pendataan dan pemetaan penyuluh, Lembaga, KUA, masjid/mushalla dan tanah wakaf yang disebabkan oleh sistem pendataan yang belum digunakan di daerah.

b. Faktor Eksternal

Dalam proses pencapaian Kinerja, untuk beberapa indikator kinerja mengharuskan Ditjen Bimas Islam untuk selalu bersinergi dan berkoordinasi dengan pihak lain, misal dalam proses sertifikasi tanah wakaf yang harus berkoordinasi dengan BPN. Selain itu, dalam penetapan peningkatan standar pelayanan KUA terdapat indikator keberhasilan KUA yang sudah milik sendiri, namun kenyataannya masih banyak lahan KUA yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sehingga Kementerian Agama tidak dapat merenovasi gedung sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Maka dianggap perlu untuk melakukan koordinasi lebih mendalam kepada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

2) HAMBATAN DALAM PENCAPAIAN TARGET PER INDIKATOR

1) Jumlah penyuluh agama Islam yang difasilitasi

Belum terintegrasi data jumlah penyuluh dengan jumlah anggaran yang dcairkan di daerah, sehingga menyulitkan penanggung jawab untuk mendapatkan data jumlah penyuluh yang telah difasilitasi.

2) Jumlah Lembaga Sosial Keagamaan yang Difasilitasi untuk Ditingkatkan Kualitas Pelayanannya.

Sulitnya koordinasi dengan Lembaga Keagamaan yang bersangkutan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan bantuan. Lembaga keagamaan yang telah mendapatkan bantuan dari pihak pemda setempat masih mengajukan bantuan, sehingga pada saat proses pencairan tertolak, hal ini yang terkadang memperlambat proses pengajuan bantuan.

3) Jumlah KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan

Saat ini masih banyak KUA yang belum mempunyai lahan dan gedung sendiri, lahan yang digunakan masih berstatus sewa, milik Pemda, maupun tanah wakaf. Keterbatasan anggaran untuk

pembelian/pengadaan lahan KUA, sehingga tidak bisa merenovasi gedung untuk memenuhi kriteria standar pelayanan. Keterbatasan SDM di daerah juga mempengaruhi dalam pemenuhan standar pelayanan KUA.

4) Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan KUA

Metode survey kepuasan masyarakat yang akan di laksanakan di tahun ini menggunakan aplikasi diharapkan tidak ditemui hambatan/kendala yang berarti.

5) Jumlah Masjid/Mushalla yang Terfasilitasi Bantuan

Belum teralokasinya anggaran Sosialisasi Juknis Bantuan, sehingga dalam pemenuhan kelengkapan dokumen asli persyaratan bantuan dari pihak pemohon seringkali tidak terpenuhi tepat waktu.

6) Jumlah Lembaga Zakat (BAZ) Provinsi dengan opini “terbaik” audit syariah

Draft PMA yang mengatur pengawasan, pendampingan audit syariah dan akreditasi lembaga pengelola zakat belum rampung, sehingga dalam pembuatan juknis masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pengelolaan zakat.

7) Jumlah Lokasi Tanah Wakaf yang Bersertipikat

Belum ada MOU yang mengatur pengurusan sertipikat tanah wakaf, dan peraturan antara BPN pusat dan daerah yang masih berbeda sehingga biaya pengurusan sertipikat yang berbeda-beda.

D. UPAYA TINDAK LANJUT

- 1) Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama, terkait dengan data jumlah penyuluh dengan jumlah anggaran yang dicairkan di daerah;
- 2) Meningkatkan koordinasi dengan para penerima bantuan baik bantuan lembaga dan rumah Ibadah untuk mempercepat proses penyaluran;
- 3) Terus berupaya untuk koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah terkait

dengan lahan KUA, agar pemenuhan KUA yang memenuhi standar pelayanan dapat dicapai;

- 4) Mempercepat proses draft PMA yang mengatur pengawasan, pendampingan audit syariah dan akreditasi lembaga pengelola zakat;
- 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia operator aplikasi dalam rangka pemenuhan data yang akurat;
- 6) Perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja terkait dalam penetapan sasaran, indikator kinerja, target indikator yang ditetapkan dan pengalokasian anggaran.

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian Pencapaian Kinerja pada bab I, Ditjen Bimas Islam telah melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan misi yang diembannya, sebagaimana kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Ditjen Bimas Islam, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Belum seluruh Indikator menunjukkan capaian seperti yang diharapkan, karena itu perlu dilakukan peningkatan capaian di triwulan III sekaligus melakukan evaluasi terhadap target-target yang tidak mungkin dicapai.
- 2) Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama Ditjen Bimas Islam sebagian besar Indikator Kinerja Utama belum bisa mencapai target 50%, dan hanya sebagian kecil IKU yang tercapai target 50%.
- 3) Tugas-tugas dalam bidang keagamaan yang diemban oleh Ditjen Bimas Islam sebagaimana diamanahkan dalam Renstra 2015 – 2019 secara umum telah tercapai dengan baik, meski dalam perjalanannya terdapat banyak kendala sehingga mendorong Ditjen Bimas Islam untuk merevisi kembali target yang tidak bisa dilaksanakan.